BABI

PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

Kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan telah menjadi masalah global yang diperdebatkan oleh para pemimpin internasional. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), juga dikenal sebagai Agenda Pembangunan Berkelanjutan, diadopsi oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada 25 September 2015 di New York, dan menampilkan tujuh belas tujuan dan 163 target untuk rencana aksi global 2015-2030. Pariwisata memiliki peran penting dalam mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan 2030 Perserikatan Bangsa-Bangsa. Sebagai organisasi khusus PBB di bidang pariwisata, UNWTO didedikasikan untuk meningkatkan dampak positif pariwisata, khususnya pada kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan, yang merupakan salah satu tujuan SDGs. UNWTO bermitra dengan UN Women untuk membawa isu kesetaraan gender ke garis depan sektor pariwisata, mempromosikan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan, serta mendorong negaranegara anggota untuk mengarusutamakan isu kesetaran gender dalam kebijakan pariwisata di negaranya masing-masing.

UNWTO bekerja sama dengan UN Women untuk membawa kesetaraan gender ke garis depan industri pariwisata, mempromosikan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan, dan mendorong negaranegara anggota untuk memasukkan kesetaraan gender ke dalam kebijakan pariwisata mereka.

Indonesia berada di peringkat 101 dari 156 negara dalam hal kesenjangan gender, menurut Laporan Kesenjangan Gender Global 2021. Beberapa faktor penyebab ketimpangan, menurut Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) tahun 2021, antara lain kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang belum sepenuhnya memperhatikan perbedaan kebutuhan, pengalaman, dan kondisi lain di masyarakat, baik alami dan resultan. Latar belakang ekonomi, layanan kesehatan yang buruk, kesempatan kerja yang terbatas, ketidaksetaraan pendidikan, dan kekerasan berbasis gender adalah semua variabel yang berkontribusi terhadap ketidaksetaraan.

Menurut Nugroho (2008), berikut adalah tujuan yang perlu dicapai dalam rangka pemberdayaan perempuan dalam masyarakat:

- meningkatkan kesempatan perempuan untuk berpartisipasi dalam kegiatan yang berkaitan dengan pembangunan;
- meningkatkan kapasitas perempuan untuk mengambil peran kepemimpinan, baik dalam hal perencanaan dan pelaksanaan proyek, serta mengawasi dan menilai kemajuan;
- 3. meningkatkan peran dan fungsi organisasi atau kelompok perempuan di tingkat lokal sebagai wadah pemberdayaan perempuan lainnya. Hal ini dapat dilakukan dengan meningkatkan kemampuan mengelola UKM dan industri besar dalam rangka mendukung peningkatan kebutuhan

rumah tangga serta membuka lapangan kerja dan menumbuhkan kemandirian; serta

 Penguatan fungsi dan peran organisasi dan kelompok perempuan di tingkat masyarakat sehingga dapat menjadi wadah pemberdayaan perempuan lainnya.

Menurut Ramchurjee (2014), pariwisata telah membuktikan kemampuannya untuk menyediakan pekerjaan dan kegiatan yang menghasilkan pendapatan yang bermanfaat bagi masyarakat. Laki-laki dan perempuan, di sisi lain, menikmati imbalan yang tidak setara dari kegiatan pariwisata. Industri pariwisata jelas memberikan banyak pilihan bagi perempuan untuk membuka lapangan kerja serta membuka jalan bagi perempuan dan masyarakat untuk bebas dari kemiskinan. Untuk kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan, pariwisata membawa peluang sekaligus hambatan. Partisipasi perempuan dalam pariwisata telah meningkat dalam beberapa tahun terakhir, sementara mereka masih kurang terwakili dalam manajemen dan kepemimpinan. Rasio perempuan pekerja dalam pariwisata cukup tinggi, meskipun didominasi oleh pekerjaan tidak terampil dan bergaji rendah.

Djelantik (2008) menyatakan keyakinan yang diwariskan bahwa perempuan lebih rendah dari laki-laki menjadi dasar pemikiran gender yang bertahan tidak hanya di Indonesia tetapi di seluruh dunia. Dibutuhkan pendekatan menyeluruh dari semua pihak, termasuk agama dan budaya, untuk memutus stigma dan stereotipe masyarakat yang sudah turun temurun

itu. Lebih jauh lagi, agama dan budaya merupakan landasan kehidupan berbangsa dan bernegara serta memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kehidupan bermasyarakat.

Kesetaraan antara jenis kelamin ini akan mengakhiri segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan, memungkinkan perempuan untuk mengendalikan hidup mereka sendiri, dan memiliki efek ganda pada semua industri lain yang mengalami pertumbuhan, termasuk pariwisata. Perlakuan yang sama terhadap jenis kelamin adalah hak asasi manusia yang mendasar yang harus diakui dan dihormati oleh laki-laki dan perempuan di setiap negara di dunia sesuai yang disampaikan oleh Hamid (2018). Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) yang berkaitan dengan kesetaraan perlu dilaksanakan dengan melakukan hal-hal gender menghapuskan segala bentuk diskriminasi dan kekerasan terhadap perempuan; memastikan bahwa perempuan berperan aktif dalam pembangunan; memberikan perempuan akses ke sumber daya ekonomi; dan peningkatan pemanfaatan teknologi informasi untuk mendorong pemberdayaan.

Anugerah Parahita Ekapraya (APE) merupakan bentuk rasa bangga dan apresiasi dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Republik Indonesia atas capaian dan janji pemerintah daerah dalam mewujudkan kesetaraan gender di daerahnya masing-masing. Kabupaten Tuban merupakan salah satu daerah di Jawa Timur yang mendapatkan penghargaan APE 2021 dalam kategori

menengah atas komitmennya dalam mewujudkan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak, serta pemenuhan kebutuhan anak. Penghargaan ini diberikan sebagai pengakuan atas upaya Kabupaten Tuban untuk mewujudkan tujuan tersebut.

Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) digunakan untuk mengetahui kesenjangan pembangunan manusia antara laki-laki dan perempuan, dan Indeks Pembangunan Gender (IDG) digunakan untuk mengetahui sejauh mana kemampuan perempuan dalam berbagai aspek kehidupan telah berkembang. Kedua indeks ini digunakan untuk menentukan Kesenjangan Gender dalam Pembangunan Manusia. Menurut Kementerian PPPA (2019), kedua ukuran ini dimanfaatkan di Indonesia untuk mengevaluasi pemberdayaan perempuan serta kontribusi pembangunan bagi kemajuan perempuan. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Kabupaten Tuban pada tahun 2021 diprediksi sebesar 88,06, sedangkan Indeks Pembangunan Gender (IPG)-nya sebesar 64,32 oleh Badan Pusat Statistik (BPS).

Nama "Bumi Wali" di Kabupaten Tuban tidak dapat dipisahkan dari sejarah yang menegaskan bahwa Tuban merupakan salah satu tempat yang paling signifikan bagi perkembangan Islam di Jawa Timur, dan juga tidak dapat dipisahkan dari banyaknya makam Wali Allah yang dapat ditemukan di Tuban. Kedua hal ini tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Syekh Maulana Makhdum Ibrahim, yang juga dikenal sebagai Sunan Bonang, adalah salah satu dari sembilan Wali Songo yang dikebumikan di Tuban. Nama lainnya adalah Sunan Bonang. Sunan Bonang wafat pada tahun 1525

M. Fakta bahwa makam Sunan Bonang memiliki tiga pintu masuk adalah bukti paling nyata keberadaannya. Gerbang pertama berbentuk regol, dan gerbang kedua dan ketiga masing-masing berbentuk paduraksa. Peziarah telah mencapai kompleks situs suci atau bangunan penting, seperti makam orang-orang suci yang dihormati, ketika mereka melewati gerbang yang dirancang dengan gaya arsitektur Hindu-Budha.

Sebagai daya tarik wisata religi, Makam Sunan Bonang menarik banyak peziarah setiap tahunnya, yang pada gilirannya membawa manfaat ekonomi bagi warga Kelurahan Kutorejo. Alhasil, kawasan di sekitar Makam Sunan Bonang dipenuhi oleh banyak pedagang yang menjual barang-barang kebutuhan para peziarah, seperti oleh-oleh, kerajinan tangan, dan makanan khas. Sebagai konsekuensi langsung dari ini, berbagai macam bisnis yang melayani kebutuhan wisatawan dan menyediakan kenyamanan mereka telah muncul. Karena terletak di tengah kota, Kawasan Makam Sunan Bonang semakin memudahkan pengunjung untuk menjangkau destinasi wisata tetangga seperti Museum Kambang Putih, Pantai Boom, Masjid Agung, dan Alun-alun.

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Tuban tahun 2021 jumlah penduduk Kelurahan Kutorejo sebanyak 3.646 jiwa. Terdapat sejumlah 1.090 kepala keluarga, dengan 1.811 laki-laki dan 1.835 perempuan di total populasi. Seperti dapat dilihat, proporsi perempuan terhadap laki-laki dalam populasi secara signifikan lebih tinggi. Namun, disparitas populasi ini hampir seimbang karena fakta bahwa jumlah orang

yang berbeda di antara keduanya tidak terlalu signifikan; lebih tepatnya, perbedaannya adalah sekitar 81 orang. Sebagai konsekuensinya, dapat dikatakan bahwa para pelaku ekonomi atau penduduk yang bekerja di dekat makam terbagi rata antara pekerja laki-laki dan perempuan.

Sebagai anggota dan bagian dari masyarakat, perempuan memiliki kesempatan yang sama dengan laki-laki untuk bekerja di industri pariwisata. Menurut Ampumuza et al. (2008), ada tiga prinsip mendasar dalam pemberdayaan perempuan dalam pariwisata yaitu: memperoleh kemanfaatan, menumbuhkan kemandirian, dan merealisasikan kesetaraan yang diterima perempuan dalam pariwisata. Pemberdayaan perempuan harus diprioritaskan dalam kerangka gagasan wisata yang memasukkan pemberdayaan masyarakat. Adalah mungkin bagi perempuan untuk berperan aktif dalam kegiatan ekonomi jika mereka memanfaatkan kesempatan luar biasa yang dihadirkan oleh pengenalan pilihan karir baru.

Permasalahan ini pada akhirnya merancang penelitian ini untuk mengetahui bagaimana pariwisata dapat menjadi elemen pendukung pemberdayaan perempuan khususnya dalam kegiatan pariwisata di Kawasan Makam Sunan Bonang dengan mengangkat judul "Pemberdayaan Perempuan di Daya Tarik Wisata Makam Sunan Bonang, Kabupaten Tuban".

Fokus Penelitian

Penelitian ini berfokus pada bagaimana pemberdayaan perempuan dalam kegiatan pariwisata di kawasan Makam Sunan Bonang Kabupaten Tuban dapat didukung oleh pariwisata sebagai faktornya. Mengingat hal ini, fokus utama dari penelitian ini dapat difokuskan sebagai berikut:

- Manfaat yang diterima perempuan karena adanya kegiatan pariwisata di Makam Sunan Bonang,
- 2. Kemandirian perempuan di Makam Sunan Bonang, dan
- 3. Kesetaraan partisipasi perempuan di Makam Sunan Bonang.

Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana kegiatan pariwisata di Kawasan Makam Sunan Bonang sebagai pemberi manfaat, sebagai faktor dalam menumbuhkan kemandirian, dan kesetaraan dalam pemberdayaan perempuan di operasionalitasnya.

Keterbatasan Penelitian

Beberapa hal yang menjadi batas metodologis dalam penelitian ini adalah peran kegiatan pariwisata di Makam Sunan Bonang yang melibatkan perempuan agar perempuan dapat merasakan manfaat, memperoleh kemandirian, dan menerima kesetaraan dalam operasionalitas kegiatan pariwisatanya. Responden perempuan dibataskan pada perempuan yang mendirikan usaha di Makam Sunan Bonang.

Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini dapat dibagi menjadi dua kategori yakni manfaat teoretis dan manfaat praktis, seperti yang dijelaskan di bawah ini:

1. Manfaat Teoretis

Secara teoretis, penelitian ini dimanfaatkan untuk mengisi kesenjangan penelitian dengan mengkaji bentuk pemberdayaan perempuan dalam pariwisata di Kawasan Makam Sunan Bonang.

2. Manfaat Praktis

Manfaat penelitian ini secara praktis diharapkan dapat menjadi sarana dan memberi kontribusi dalam pengembangan teori mengenai pemberdayaan perempuan dalam kegiatan pariwisata